

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN MUKIM DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

ANITA SURYA AL-YAHYA

Abstract

The effectiveness of the Mukim Government in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency is an important study in the administration of government activities which oversees several villages and is directly under and responsible to the Camat. Based on the results of the research on the effectiveness of the Mukim Government in general it has not gone well. This is influenced by organizational characteristics; environmental characteristics; factor characteristics of workers; and the characteristics of management policies and practices. The right strategy and priority is based on the SWOT and Litmust Test analysis to improve the effectiveness of the Mukim Government, namely: providing training to increase the capacity of the apparatus; clarify and detail the authority of the Mukim Government through regulation; explore and utilize the potential resources available in the Settlements; provide adequate facilities / parasana; and uti

Keywords: *Effectiveness, Mukim, Mukim Government, Implementation of Mukim Government*

PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar terhadap paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik bisa menekankan peran pemerintah sebagai regulator untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi dan kewenangan. Perubahan kebijakan di wilayah Aceh ditandai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pembagian struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwa, “Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong”. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim tidak hanya sebagai lembaga adat melainkan pula sebagai lembaga pemerintahan.

Secara *de jure* Pemerintahan Mukim telah diakui namun secara *de facto* implementasi tugas-tugas Mukim lebih cenderung difungsikan dalam kegiatan adat istiadat atau penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Keberadaan Pemerintahan Mukim menghadapi berbagai permasalahan, baik struktur organisasi dan manajemen yang masih lemah, sistem administrasi yang lemah, belum sempurnanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Mukim dengan Pemerintahan Gampong, belum jelasnya mekanisme pendanaan, sarana dan prasarana yang masih terbatas, dan lain sebagainya. Maka diperlukan kajian untuk dapat mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan

menganalisis Efektivitas, faktor-faktor, serta strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan efektivitas Organisasi Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian Terdahulu

Efektivitas sebuah organisasi pemerintahan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Keberadaan Pemerintahan Mukim dalam struktur pemerintahan di Aceh, menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti untuk melakukan kajian dan analisa yang lebih mendalam. Berbagai penelitian terkait dengan Pemerintahan Mukim ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dengan hasil kajian dan analisa yang berbeda-beda.

Dari beberapa penelitian belum ada yang secara persis membahas tentang efektivitas organisasi Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini lebih menekankan pada dimensi efektivitas organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian tentang efektivitas organisasi Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, masih sangat relevan untuk dilakukan kajian dan analisa lebih mendalam.

Konsep Efektivitas Organisasi Publik

Konsep Organisasi

Menurut Thoha (2002:102), “organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu”.

Konsep Efektivitas Organisasi Publik

Konsep Organisasi

Menurut Thoha (2002:102), “organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu”. Setiap organisasi baik profit maupun non profit, memiliki tujuan-tujuan yang telah digariskan untuk dapat dicapai melalui program-program kerja.

Konsep Efektivitas Organisasi

Menurut Argyris (1968:312), efektivitas organisasi adalah “keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan pemecahan dan pemanfaatan tenaga manusia”. Dalam hal ini, efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Steers (1985:9-11) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan karakteristik kebijakan dan praktek manajemen.

1. Karakteristik Organisasi.
2. Karakteristik lingkungan.

3. Karakteristik pekerja.
4. Kebijakan dan praktek manajemen.

Konsep Desentralisasi

Desentralisasi menurut Webster dalam Surianingrat (1981:3) adalah, “*to decentralize means to divide and distribute, as governmental administration; to withdraw from the center or place of concentration*” (desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan; mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi).

Beberapa hal yang menjadi alasan perlunya kebijakan desentralisasi dikemukakan oleh The Liang Gie (1968:35-41), antara lain:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
- d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan sesuatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Konsep Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni : Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti *legitimacy, accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control*; Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Pemerintahan Mukim di Aceh

Otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh memberikan kesempatan Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Pembagian struktur organisasi pemerintahan di Provinsi Aceh, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa, “Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong”.

Mukim dengan imum mukim sebagai pemimpin merupakan lembaga adat yang masih hidup, diakui dan menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat secara damai. Pengalaman sejarah membuktikan, imum mukim bersama masyarakat mukim mempunyai andil yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang berhubungan dengan efektivitas organisasi Pemerintahan Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Metode ini menjadi pilihan peneliti karena diharapkan akan mampu mengungkap realitas yang terjadi di lapangan, dan lebih *sensitive* dan *adaptif* terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian, serta lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Johan Pahlawan

Kondisi Geografis

Kecamatan Johan Pahlawan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Meulaboh sebagai Ibukota pemerintahan kecamatan. Wilayah Kecamatan Johan Pahlawan memiliki batas-batas administrasi wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samatiga sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meureubo.

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Johan Pahlawan tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik sebesar 63.975 jiwa yang terdiri dari 32.441 jiwa penduduk laki-laki dan 31.534 jiwa penduduk perempuan.

Kondisi Pemerintahan

Secara administrasi, Kecamatan Johan Pahlawan terdiri dari 4 Mukim, 21 Gampong, dan 86 Dusun.

Kondisi Sosial Budaya

Di bidang pendidikan, berdasarkan data Kecamatan Johan Pahlawan dalam angka tahun 2017 terdapat 36 TK/RA, 37 SD/MI, 13 SMP/MTs, 13 SLTA/MA/SMK, dan 9 Akademi/Perguruan Tinggi. Sedangkan di bidang keagamaan, masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan 100% menganut agama Islam dan dilengkapi dengan 57 sarana ibadah.

Kemampuan Menyesuaikan Diri

Ketidakmampuan aparat Pemerintah Mukim terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi barunya, serta ketidakmampuan aparat Pemerintah Mukim untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok sehari-hari. Sedangkan dari aspek struktur organisasi dan sikap perilaku aparat, Pemerintah Mukim telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini.

Produktivitas

Aspek produktivitas yang tidak efektif dapat diketahui dari lambatnya pelayanan yang diberikan, produk pelayanan yang tidak sesuai, disiplin aparat yang rendah, dan kapasitas aparat yang belum memadai.

Kepuasan Kerja

Perubahan organisasi Mukim dari lembaga adat menjadi organisasi pemerintahan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, ternyata belum diikuti kemampuan meningkatkan kepuasan kerja aparturnya (persepsi tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai beban yang besar, kecemburuan sosial terhadap Pemerintah Gampong, dan insentif yang rendah).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemerintah Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh

Karakteristik Organisasi

Dari aspek desentralisasi kewenangan, belum adanya batasan kewenangan yang jelas antara pemerintah kecamatan, Mukim, dan Gampong. Selain itu, hubungan kerja antara Pemerintah Mukim dengan pemerintah tingkat atas dan tingkat bawahnya sudah berjalan baik, namun dari sisi keterlibatan dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Mukim sering tidak dilibatkan. Di sisi lain, Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan juga belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Karakteristik Lingkungan

Iklim kerja pada Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan sudah sangat baik dan kondusif. Kondisi ini sangat mendukung efektivitas Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kemukiman.

Karakteristik Pekerja

Aspek proses perekrutan dan penempatan aparatur Pemerintah Mukim yang demokratis sesuai nilai-nilai kearifan lokal, aparatur Pemerintah Mukim selalu menunjukkan perilaku yang baik dan sopan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, di sisi lain karakteristik pekerja pada Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan juga belum mendukung efektivitas Pemerintah Mukim. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja aparatur Pemerintah Mukim, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, serta kurangnya inovasi dan kreativitas aparatur Pemerintah Mukim dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, aspek struktur organisasi dan aspek hubungan kerja Pemerintah Mukim dengan pemerintah tingkat atas dan tingkat bawahnya sudah berjalan baik. Sedangkan aspek desentralisasi kewenangan yang tidak jelas. *Kedua*, faktor karakteristik lingkungan adanya iklim kerja yang kondusif dalam organisasi Pemerintah Mukim. Sedangkan aspek yang menghambat adanya persepsi negative masyarakat Mukim dan aparatur Pemerintah Mukim terhadap perubahan Mukim menjadi unit pemerintahan, serta budaya birokrasi Pemerintah Mukim yang lambat. *Ketiga*, faktor karakteristik pekerja Pemerintah Mukim adalah proses perekrutan dan penempatan aparatur Pemerintah Mukim yang demokratis sesuai nilai-nilai kearifan lokal. Sedangkan aspek yang menghambat adalah kinerja aparatur Pemerintah Mukim yang rendah, tanggung jawab yang kurang terhadap tugas dan fungsinya, serta kurangnya inovasi dan kreativitas aparatur Pemerintah Mukim. *Keempat*, faktor karakteristik kebijakan dan praktek manajemen adanya tujuan strategis penguatan Mukim menjadi unit pemerintahan untuk ikut mempercepat proses pembangunan. Sedangkan aspek yang menghambat kapasitas aparatur Pemerintah Mukim yang kurang memadai, sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang terbatas, ketidakmampuan aparatur Pemerintah Mukim dalam menyerap dan menyampaikan informasi, pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal, serta ketidakmampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Matriks SWOT Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) Pemerintahan Mukim Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Strength (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi yang lengkap dan jelas 2. Kepemimpinan Imeum Mukim yang kuat 3. Iklim organisasi yang kondusif 4. Potensi sumberdaya Mukim yang cukup besar 5. Kehidupan berdemokrasi yang kuat dalam masyarakat 6. Sikap dan perilaku aparaturnya yang baik dan sopan 	<p style="text-align: center;">Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas dan kinerja aparaturnya rendah 2. Keterbatasan sarana/prasarana 3. Keterbatasan anggaran 4. Budaya Birokrasi Yang Lambat 5. Pemanfaatan potensi sumberdaya Mukim belum maksimal 6. Persepsi Negatif dan pesimisme Masyarakat Mukim
<p style="text-align: center;">Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang memperkuat Pemerintah Mukim 2. Kewenangan Mukim bertambah besar 3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 4. Kesempatan Yang Sama Untuk Meningkatkan Dan Mengembangkan Kapasitasnya 	<p style="text-align: center;">SO Strategies</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjelas dan merinci kewenangan melalui regulasi 2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas 3. Membina dan meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama dengan semua pihak 	<p style="text-align: center;">WO Strategies</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya 2. Menyediakan sarana/parasana yang memadai 3. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Kemukiman
<p style="text-align: center;">Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Dilibatkan Dalam Pengambilan Keputusan 2. Pengawasan Dan Pengendalian Yang Kurang Maksimal 	<p style="text-align: center;">ST Strategies</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten 2. Melakukan pengawasan dan pegendalian secara intensif dan memberikan <i>reward and punishman</i> 	<p style="text-align: center;">WT Strategies</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sumber : Hasil Penelitian, Data Dianalisis

Berdasarkan identifikasi melalui hasil analisis SWOT yang mengacu pada faktor eksternal dan internal di atas, terdapat 10 (sepuluh) isu strategis yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan, yaitu :

1. Memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi;
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas;
3. Membina dan meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama dengan semua pihak;
4. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya;
5. Menyediakan sarana/parasana yang memadai;
6. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Kemukiman;
7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten;
8. Melakukan pengawasan dan pegendalian secara intensif dan memberikan *reward and punishman*;
9. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten; dan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Hasil Litmust Test

Dari hasil litmus tes di atas diperoleh 5 (lima) isu strategis yang dapat diprioritaskan :

1. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur

Pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Mukim yang dapat dilakukan, diantaranya adalah pelatihan Sekretaris Mukim, pelatihan kelembagaan, maupun pelatihan lainnya dalam upaya membekali aparatur Pemerintah Mukim agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi

Kewenangan Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan saat ini memang sangat besar, namun dalam pelaksanaannya belum ada kejelasan, rincian, dan batasan kewenangan Pemerintah Mukim, khususnya kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Kemukiman. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hendaknya segera membuat regulasi untuk memperjelas batasan kewenangan Pemerintah Mukim agar kewenangan yang dimiliki dapat dioperasionalkan dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas.

3. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Kemukiman

Dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, salah satu strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Mukim adalah menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di Kemukiman secara optimal. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam dengan baik dan benar akan meningkatkan pendapatan asli Mukim yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di Kemukiman. Sedangkan potensi sumberdaya manusia yang ada dapat dikembangkan dan ditingkatkan kapasitasnya untuk kemajuan dan kemandirian Mukim dan masyarakat Mukim secara keseluruhan.

4. Menyediakan sarana/parasana yang memadai

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan strategi dan prioritas yang sangat penting untuk mendukung terwujudnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Mukim. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Mukim adalah sarana perkantoran dan sarana pendukung lainnya.

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Mukim dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menyiapkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan, menyiapkan sumberdaya aparatur yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, baik dari aspek kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, kemampuan meningkatkan produktivitas kerja, dan kemampuan meningkatkan kepuasan kerja aparaturnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yaitu :
 - a. Karakteristik organisasi, yaitu : aspek desentralisasi kewenangan yang tidak jelas, tidak adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum dimanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.
 - b. Karakteristik pekerja, yaitu : regulasi perubahan organisasi Mukim menjadi organisasi pemerintahan yang kurang tepat, persepsi negatif masyarakat Mukim dan aparatur Pemerintah Mukim terhadap perubahan Mukim menjadi unit pemerintahan, serta budaya birokrasi Pemerintah Mukim yang lambat.
 - c. Karakteristik pekerja, yaitu : kinerja aparatur Pemerintah Mukim yang rendah, tanggung jawab yang kurang terhadap tugas dan fungsinya, serta kurangnya inovasi dan kreativitas aparatur Pemerintah Mukim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - d. Karakteristik kebijakan dan praktek manajemen, yaitu : kapasitas aparatur Pemerintah Mukim yang kurang memadai, sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang terbatas, ketidakmampuan aparatur Pemerintah Mukim dalam menyerap dan menyampaikan informasi, pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal, serta ketidakmampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT dan *Litmust Test* untuk meningkatkan efektifkan Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yaitu:
 - a. Memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi.
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Membina dan meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama dengan semua pihak.
 - d. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur.
 - e. Menyediakan sarana/parasana yang memadai.
 - f. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Kemukiman.
 - g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten.
 - h. Melakukan pengawasan dan pegendalian secara intensif dan memberikan *reward and punishman*.

- i. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kabupaten.
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

SARAN

Setelah melalui tahapan penelitian terhadap strategi-strategi yang telah dirumuskan, maka peneliti menyarankan 5 (lima) strategi yang memiliki skor tertinggi (sesuai urutan skor tertinggi hingga urutan kelima) untuk dijalankan dan dikembangkan oleh Pemerintah Mukim di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yaitu :

1. Memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur.
2. Memperjelas dan merinci kewenangan Pemerintah Mukim melalui regulasi.
3. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Kemukiman.
4. Menyediakan sarana/parasana yang memadai.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Anderson, A.L & kyprianov, A. 1994. *Effective Organization Behaviour A Skill And Activity-Based Approach*. Blackwell Bussines
- Argyris, Chris. 1968. *Organizational Effectiveness*. Dalam David L Sill S (Ed). *International Enciclopedia of Social Science*. New York : The Maximillan Company and the free press
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods, And Practices*. USA : Creative Commons Atribusi-BY
- Benveniste, Guy. 1994. *The Twenty-Fisrt Century Organization*. San Francisco : Jossey-bass Publisher
- Bryson, John M. 1995. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. San Francisco : Jossey Bass Publishers
- 2000. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bennis, Warren & Michael Mische. 1996. *Organisasi Abad 21 Reinventing Melalui Reengineering*. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo
- Cheema, Shabbir G. & Dennis A Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries*. London : Sage Publications, Beverly Hills.
- Etzioni, Amitai. 1983. *Modern Organization*. New York: Prentice-Hall Inc.
- French, Wendell and Bell Jr C.H. 1995. *Organization Development Behavioral Science Interventions for Organization Improvement*. Prentice Hall International
- Gibson, James L, John M Ivancevich, James H Donnely.1996. *Organisasi : Perilaku Struktur Proses*. Nunuk Adiarni (Terj). Jakarta : Bina Aksara

- Grindle, Merilee S. 1997. *Getting Good Government*. Harvard University Press
- Handayaniingrat, Soewarno. 1982. *Pengantar Ilmu Pengetahuan dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Hogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga
- Hardjito, Dydiat. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi beberapa factor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology Methods and Techniques (second revised edition)*. New Delhi : New Age International
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Modul Sosialisasi Sistem AKIP
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Mas'oe'd, Mochtar. 1994. *Negara, Kapital, dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Miles, B.B. dan A.M. Huberman. 2009. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Neuman, W Laurence. 2006. *Social Research Methods*. United States of America : Allyn and Bucon
- Nawawi, Hadari. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University press
- Robbins, S.P. 1994. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan
- Rangkuti, freddy. 2000. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Ranganayakulu, K.C.S. 2005. *Organisational Behaviour*. New Delhi : Atlantic Publishers & Dist
- Redjo, Samugyo Ibnu. 2012. *Transformasi Manajemen Pemerintahan*. Bandung : AIPI Bekerjasama dengan Puslit KPK LPPM Unpad
- Rowa, Hyronimus. 2013. *Budaya Pemerintahan : Kajian Awal Dalam Bidang Pemerintahan*. Jatinangor : IPDN Press
- Surianingrat, Bayu. 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia : Suatu Analisa*. Jakarta : Dewaruri Press
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization, The Territorial Dimension of The State*. London : George Allen & Unwin Ltd
- Suwarto, F. X. 1999. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta : Andi Offset
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2016. *Paradigma Baru Good Governance, Menempatkan Rakyat dan Birokrasi Pemerintah, Private Sector sebagai Pusat Kegiatan Pemerintahan : Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jatinangor : IPDN Press

- The Liang Gie. 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Gunung Agung
- Thoha, Miftah. 2000. *Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta : UGM
- 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tyson, Shaun dan T. Jackson. 2001. *The Essence of Organizational Behaviour : Perilaku Organisasi*. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Deddy Jacobus dan A. Dwi Prabantini. Yogyakarta
- Westra, Pariata, Sutarto, dan Ibnu Syamsi. 1989. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta : CV Haji Masagung
- Wahyudi, Agustinus Sri. 1996. *Manajemen Strategik : Pengantar Proses Berpikir Strategik*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia
- Wallman, Nicholas. 2011. *Research Method The Basic*. Amerika Serikat : Routledge.

JURNAL ILMIAH

- Keban, Yeremias T. 2000. *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. Jakarta : Jurnal Perencanaan Pembangunan.
- Satriani, Septi. 2009. *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta : Jurnal Penelitian Politik-LIPI. Vol. 6 No. 1
- Syahbandir, Mahdi. 2014. *Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim Di Aceh*. Aceh : Qanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 62 Th. XVI (April 2014)
- Mukhlis. 2015. *Perkembangan Mukim di Aceh*. Aceh : Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe. Vol. 4 No. 2 (Agustus 2015)
- Tripa, Sulaiman dan Taqwaddin Husin. 2015. *Arah Pengaturan Tata Batas Mukim di Kabupaten Aceh Barat*. Aceh : Jurnal Transformasi Administrasi. Vol. 05 No. 01
- Muzakir dan Husaini Ibrahim. 2017. *Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh : Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*. Aceh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol. 2 No. 2 (Mei 2017)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2014 Tentang Perangkat Daerah
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim
- Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Mukim Dalam Kabupaten Aceh Barat

